



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 7530-7540

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) Pada Pembangunan Drainase di Kecamatan Sunggal

Juan Cavin Parulian^{1✉}, Nur Afifah²

Universitas Sumatera Utara

Email: juancavin2@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu kegiatan penting dalam pembangunan suatu negara atau wilayah. Peneliti menggunakan implementasi model Van Mater dan Van Horn pada tahun 1975. Pendekatan kualitatif menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian pada tulisan dilakukan secara primer dan sekunder. Hasil penelitian indikator ukuran dan tujuan kebijakan menunjukkan pembangunan drainase Sunggal dapat dikatakan belum tercapai dengan maksimal. Indikator sumberdaya menunjukkan bahwa APBD menjadi sumber utama dalam pembangunan. Indikator karakteristik agen pelaksana menunjukkan hasil proyek drainase terkesan asal-asalan. Indikator sikap atau kecenderungan pelaksana menunjukkan pembangunan drainase yang dilakukan bersifat *'top down'*. Indikator komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana menunjukkan komunikasi yang ada antara pemerintah dan pihak swasta berjalan dengan baik, tetapi antara pemerintah dan masyarakat maupun swasta dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Indikator lingkungan ekonomi sosial dan politik menunjukkan aktivitas konstruksi drainase gangguan yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Pembangunan Drainase, Implementasi, Public Private Partnership (PPP)*

Abstract

Infrastructure development is an important activity in the development of a country or region. Researchers use the implementation of the Van Mater and Van Horn model in 1975. The qualitative approach uses descriptive research with data collection techniques, namely interviews, observations and documentation. Determination of informants is done by purposive sampling. Data collection in the writing of the study is done primarily and secondary. The results of the study of the size and objective indicators of the policy indicate that the development of Sunggal drainage can be said to have not been achieved optimally. The resource indicator shows that the APBD is the main source of development. The implementing agent characteristic indicator shows that the results of the drainage project seem haphazard. The attitude or tendency indicator of the implementer shows that the drainage development carried out is 'top down'. The inter-organizational communication indicator and the activities of the implementer show that the communication between the government and the private sector is running well, but between the government and the community and the private sector and the community is not running well. The economic, social and political environment indicator shows that the construction of drainage activities is a significant disturbance for the local community.

Keywords: *Drainage Development, Implementation, Public Private Partnership (PPP)*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional. Upaya ini didorong oleh pemahaman akan pentingnya infrastruktur yang kuat dan berkualitas dalam memajukan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menghubungkan berbagai wilayah di negara kepulauan ini. Meskipun ada fluktuasi dalam anggaran infrastruktur selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berkomitmen untuk memajukan sektor ini.

Dalam upaya untuk menghadapi tuntutan pertumbuhan penduduk dan perubahan dinamika perkotaan, Provinsi Sumatera Utara, khususnya pemerintah Kota Medan telah secara konsisten meningkatkan anggaran mereka untuk infrastruktur setiap tahunnya. Peningkatan ini mencakup berbagai proyek, seperti pembangunan jalan raya, pengembangan transportasi publik, pemeliharaan jembatan, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, investasi dalam fasilitas pendidikan dan kesehatan serta pembangunan saluran drainase yang saat ini banyak dilaksanakan. Dengan peningkatan berkelanjutan dalam anggaran infrastruktur, pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah Kota Medan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Investasi dalam infrastruktur yang memadai adalah langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas, dan kualitas hidup yang lebih baik di wilayah ini.

Hal senada juga berlaku pada pembangunan drainase sebagai salah satu dari infrastruktur publik. Pembangunan drainase merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Asmorowati,dkk (2021) drainase berasal dari kata *drainage* yang artinya mengeringkan atau mengalirkan. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di bawah permukaan tanah.

Namun, pembangunan drainase juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal perencanaan yang tepat dan juga masalah timbul dari segi pembagunan drainase. Perencanaan yang matang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan drainase, memilih lokasi yang strategis, dan merancang sistem drainase yang efektif. Selain itu, pemeliharaan yang teratur juga penting agar sistem drainase tetap berfungsi dengan baik dan dapat mengatasi perubahan iklim serta tuntutan perkembangan perkotaan.

Keterbatasan SDM pemerintah serta sarana dan prasarana dalam pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan adanya suatu masalah yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah memanfaatkan beberapa alternatif pelaksanaan, salah satunya skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership*. Skema ini merupakan bentuk kerjasama antara sektor publik/pemerintah dengan sektor swasta/privat dalam menyediakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian didalamnya diatur bentuk kerjasama serta pembagian resiko. *Public-Private Partnership* (PPP) dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur drainase. Salah satu alasan utamanya adalah sumber daya manusia dan sarana serta prasarana milik swasta yang jauh lebih unggul daripada milik pemerintah. Pembangunan infrastruktur drainase membutuhkan usaha yang signifikan, dan pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kendala yang dihadapi ini, maka diperlukannya implementasi kebijakan dimana nantinya melalui implementasi ini maka diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Implementasi kebijakan tentang keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan drainase sangat penting dengan pertimbangan beberapa faktor kunci. Pertama-tama, sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk proyek drainase seringkali melibatkan investasi besar, dan pemerintah sering menghadapi kendala anggaran. Melibatkan sektor swasta memungkinkan pemerintah dapat menghemat anggaran proyek-proyek drainase Selain itu, sektor swasta sering kali dikenal karena efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Dengan keterlibatan swasta, proyek drainase dapat memanfaatkan ide-ide inovatif, teknologi terkini, dan praktik manajemen yang efisien.

Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta menjadi solusi yang menarik untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur publik. Kemitraan ini dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya manusia, teknis, dan manajerial dari sektor swasta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur drainase. Di sisi lain, sektor swasta dapat melihat peluang yang menguntungkan dalam proyek-proyek infrastruktur di Kota Medan. Dengan adanya kelanjutan kerjasama di sektor drainase ini, diharapkan nantinya fungsi saluran drainase akan semakin optimal. Jumlah genangan yang ada semakin berkurang sehingga bentuk pelayanan dari pemerintah Kota Medan terhadap kenyamanan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

METODE PENELITIAN

Berangkat dari masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan permasalahan atau fenomena-fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk dibahas secara sistematis dan mendalam (Sugiyono, 2016:11). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, studi literature, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana kemitraan pemerintah dan swasta pada pembangunan drainase di Kecamatan Medan Sunggal. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246-253) meliputi eduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan drainase yang masif di Kota Medan, meskipun diimplementasikan secara besar-besaran, belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah banjir yang terus terjadi. Faktor utama yang mungkin menjadi penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah fokus pembangunan yang terkonsentrasi pada area atau lokasi tertentu. Adanya ketidakseimbangan perhatian terhadap berbagai daerah rentan banjir dapat mengakibatkan sumber masalah tidak tertangani secara menyeluruh.

Ketidakesesuaian cakupan proyek drainase dengan seluruh jaringan aliran air yang berkontribusi pada banjir juga perlu diperhatikan. Terkadang, kurangnya koordinasi antara lokasi banjir yang menjadi masalah dan proyek drainase menyebabkan ketidakmaksimalan

dalam efektivitas penanganan risiko banjir. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap keterkaitan antara lokasi banjir dan infrastruktur drainase menjadi suatu keharusan.

Pemerintah dan swasta memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan *Public Private Partnership (PPP)* pada pembangunan drainase. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa contoh peran keduanya dalam pembangunan drainase. Dalam hal ini, Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran dan program pembangunan drainase secara nasional.

Model *Design and Build* pada *Public Private Partnership* dalam Pembangunan Drainase di Kecamatan Sunggal

Design and Build (Desain dan Bangun) adalah suatu model kerjasama dalam proyek infrastruktur yang melibatkan pemerintah dan swasta, dikenal sebagai *Public-Private Partnership (PPP)* atau kerjasama antara sektor publik dan swasta. Model ini menekankan penyatuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan drainase, di mana kontraktor swasta tidak cuma bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, tetapi ikut serta terlibat dalam tahap desain pembangunan drainase di Kota Medan. Melalui konsep *Design and Build*, kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat berjalan menjadi lebih efisien, dan lebih dapat menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, serta juga mampu menghadapi perubahan kedepannya yang terjadi selama pembangunan drainase di Kota Medan.

Analisis Kerjasama PPP Dalam Pembangunan Drainase di Kecamatan Sunggal dengan Implementasi Model van Mater dan van Horn

Kerjasama *Public Private Partnership (PPP)* dapat dikatakan berhasil apabila faktor-faktor implementasi yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn dapat terpenuhi. Model implementasi kebijakan mereka menekankan beberapa faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan suatu proyek atau kebijakan.

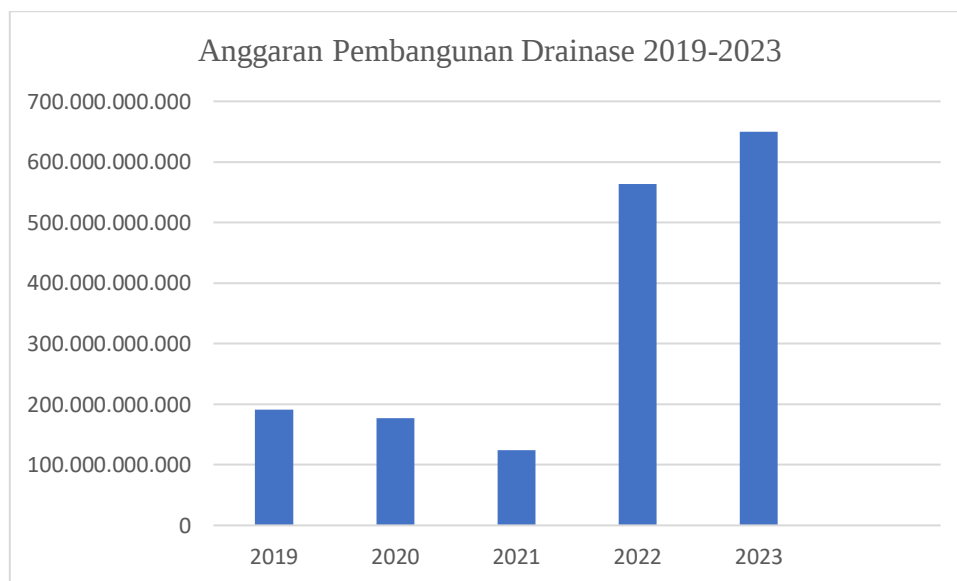
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan pemerintah melibatkan swasta dalam program pembangunan yang dilakukan karena pihak swasta lebih unggul dalam hal SDM dan sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembangunan. Selain itu, pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah suatu hal yang penting. Dalam konteks ini, ukuran yang relevan mencakup kapasitas drainase, yang mengukur kemampuan sistem dalam menangani volume air hujan dengan efisien untuk mencegah genangan dan banjir. Kegagalan mencapai target tersebut bisa menandakan ketidaksesuaian antara hasil aktual

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat mengindikasikan kurangnya perencanaan yang matang atau estimasi yang tidak akurat terkait dengan kompleksitas proyek. Selain itu, dari segi pencapaian target waktu pembangunan, kegagalan tersebut dapat mengungkapkan masalah dalam manajemen proyek, kurangnya pengawasan yang efektif, atau kesulitan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan proyek.

2. Sumber daya

Indikator sumber daya dalam pembangunan drainase yang menggunakan anggaran APBD sebagai sumber utama mencerminkan prioritas dan ketersediaan dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah infrastruktur perkotaan. Dalam konteks ini, pengalokasian dana dari APBD menjadi penanda utama komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dengan mengurangi risiko banjir dan genangan air.



Gambar 1. Anggaran Drainase Kota Medan

Sumber: Dinas SDABMBK Kota Medan, 2023

Melalui anggaran APBD, pemerintah daerah dapat menunjukkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang efektif. Selain itu, anggaran APBD juga mencerminkan ketersediaan sumber daya finansial yang dapat disesuaikan dengan dinamika lokal dan kebutuhan mendesak, memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons secara fleksibel terhadap perubahan kondisi lingkungan dan perkotaan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Indikator karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan pembangunan drainase menjadi perhatian penting ketika perbedaan pandangan yang ada antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sekitar muncul dalam wawancara terkait kinerja proyek. Meskipun dalam perspektif pemerintah dan swasta, pelaksanaan proyek mungkin dianggap berjalan dengan baik, namun pandangan ini tidak selalu tercermin dalam persepsi masyarakat setempat. Wawancara dengan masyarakat sekitar sering kali mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek drainase terkesan asal-asalan dan kurang memperhatikan kebutuhan serta kondisi lingkungan lokal. Faktor-faktor seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, atau bahkan kualitas konstruksi yang rendah dapat menjadi penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan publik merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan. Para pelaksana, baik itu birokrat, pegawai pemerintah, maupun pihak swadaya masyarakat, memiliki beragam respons terhadap kebijakan yang harus mereka terapkan.

Pembangunan drainase yang dilakukan yang bersifat '*top down*'. Dimana dalam sifat kebijakan yang seperti ini yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Dalam hal ini berupa pembangunan drainase seringkali terjadi ketika pemerintah pusat atau daerah mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah banjir atau genangan air di suatu daerah.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi yang dilakukan oleh atau yang terjadi diantara pemerintah dan swasta sudah berjalan dengan baik. dapat ditunjukkan dengan koordinasi dari pemerintah dan swasta yang cepat dalam menanggapi masalah dalam pembangunan dan juga dilakukannya evaluasi kinerja swasta selama pembangunan

drainase. Akan tetapi permasalahan terdapat pada komunikasi yang diterima oleh masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat merasa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pekerja proyek dirasakan masih kurang, khususnya pada saat sebelum pelaksanaan pembangunan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Pembangunan drainase yang mengganggu aktivitas warga sekitar dan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang berdagang merupakan masalah yang sering timbul dalam proyek infrastruktur seperti ini. Aktivitas konstruksi drainase yang melibatkan penggalian, pembangunan saluran air, dan penutupan jalan dapat mengganggu lalu lintas, mengurangi aksesibilitas, dan menyebabkan gangguan yang signifikan bagi para pedagang lokal. Bisnis yang terletak di sekitar area pembangunan mungkin mengalami penurunan pendapatan karena akses yang terbatas bagi pelanggan, kebisingan, serta debu atau polusi yang dihasilkan oleh proyek tersebut.

SIMPULAN

Pembangunan drainase di Sunggal belum mencapai hasil yang optimal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sumber utama pendanaan, namun hasil proyek terkesan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan dan tampak kurang berkualitas. Proses pelaksanaan pembangunan cenderung bersifat top-down, dengan keterlibatan masyarakat yang minim. Meskipun komunikasi antara pemerintah dan pihak swasta berjalan dengan baik, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pihak swasta dengan masyarakat, tidak berjalan secara efektif. Selain itu, kegiatan konstruksi drainase menimbulkan gangguan signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Alfen, H. W., Kalidindi, S. N., Ogunlana, S., Wang, S., Abednego, M. P., Frank-Jungbecker, A., ... & Zhao, G. (2009). *Public-private partnership in infrastructure development*:

- case studies from Asia and Europe*. Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität.
- Bastian, Indra. (2002). *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121-180.
- Digdowniseiso, K. (2019). *Teori pembangunan*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Yogyakarta. UGM press.
- ESCAP, U. (2011). *A guidebook on public-private partnership in infrastructure*.
- Istianato, Bambang. (2011). *Privatisasi Dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik Ke Kontemporer*. Depok. Raja Grafindo Persada.
- Manullang. (2016). *Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Perenadamedia Grup.
- Nugroho, R., & Toyib, Y. (2018). *Transformasi Public Private Partnership Indonesia*. PT Alex Media Komputindo.
- Saleh, C. (2020). *Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*. Pustaka Universitas Terbuka, 1.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta. Gava Media.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang. Inteligensia Media
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suprihanto, J. (2018). *Manajemen*. Yogyakarta. UGM PRESS.
- Suyono Dikun, ed., *Infrastruktur Indonesia – Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis* (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Malang.

Universitas Brawijaya Press.

- Abdullah, M. T. (2020). Model Public Private Partnership Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 102-114.
- Ardiansah, A., Bagio, B. K., & Nabella, N. P. R. (2018). Pelaksanaan Pembangunan Drainase Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. *Dinamika Madani: Jurnal Pembangunan Daerah dan Inovasi*, 1(1), 49-62.
- Asmorowati, E. T., Rahmawati, A., Sarasanty, D., Kurniawan, A. A., Rudiyanto, M. A., Nadya, E., & Nugroho, M. W. (2021). Drainase Perkotaan. *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*.
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1).
- Buso, Marco., C. Dosi., M. Moretto. (2018) Termination Fees and Contract Design in Public-Private Partnerships. *Political Economy: Government Expenditures & Related Policies eJournal*, 1-36
- Casnoto, H. (2019). Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur pada Daerah Otonom melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Studi pada Pemerintah Kota Bandung). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Cui, C., Liu, Y., Hope, A., & Wang, J. (2018). Review of studies on the public-private partnerships (PPP) for infrastructure projects. *International journal of project management*, 36(5), 773-794.
- Djabbari, M. H., Alwi, A., & Thamrin, S. H. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-13.
- Kang, S., Mulaphong, D., Hwang, E., & Chang, C. K. (2019). Public-private partnerships in developing countries: Factors for successful adoption and implementation. *International Journal of Public Sector Management*, 32(4), 334-351.
- Kriswibowo, A., Wahyuningtiyas, A., Kusmayadi, N. W., & Prasetyo, K. (2021). Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan limbah medis Covid-19 di Kota Madiun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 8-18.
- Kwak, Y. H., Chih, Y., & Ibbs, C. W. (2009). Towards a comprehensive understanding of public private partnerships for infrastructure development. *California management review*, 51(2), 51-78.

- Li, J., Dang, A., & Song, Y. (2022). Defining the ideal public space: A perspective from the publicness. *Journal of Urban Management*.
- Mahsyar, A. (2015). Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Aset Publik di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).
- Noho, M. D. H., Santoso, B., Prananingtyas, P., & Islami, T. A. (2021). Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia dengan Negara-Negara Asean. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 728-742.
- Nurhayati, Y. N., Kusumawati, D. K. K., & Yuliawati, E. Y. Y. (2020). Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia. *WARTA ARDHIA*, 46(1), 26-38.
- Ridwan, B., Pratikso, P., & Mudyono, R. (2021, November). Tantangan Implementasi Proyek Infratraktur Melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta Di Bagian Selatan Provinsi Jawa Barat. In *Seminar Nasional Ketekniksipilan, Infrastruktur dan Industri Jasa Konstruksi (KIIJK)* (Vol. 1, No. 1, pp. 49-58)..
- Setiawan, S. Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Dalam Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tangerang
- Verweij, S., & van Meerkerk, I. (2021). Do public–private partnerships achieve better time and cost performance than regular contracts?. *Public Money & Management*, 41(4), 286-295.